



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

LKJIP



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, amanah, Transparan dan Akuntabel dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan bentuk upaya mendorong kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di era reformasi. Tuntutan dan aspirasi masyarakat menjadi sebuah bahan evaluasi kemajuan pembangunan dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Setiap berakhirnya tahun anggaran, maka setiap SKPD diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan Laporan Kinerja Instansi Dinas Perikanan tahun 2024. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun.

Penyusunan LKjIP Dinas perikanan Kabupaten Luwu tahun 2024, didasarkan pada indikator kinerja yang ada dan ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang

direncanakan. Realisasi dilaporkan dalam LKjIP adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada tahun 2024.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari apa yang diharapkan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan laporan ini sangat diharapkan. Terima kasih.



Belopa, Januari 2025
Kepala Dinas Perikanan,

IL BAHARUDDIN
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19650903 199203 1 01 1

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
1.5. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN.....	5
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1. RPJMD TAHUN 2019-2024	10
2.2. RENCANA STRATEGIS	12
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
2.4. PROGRAM PEMBANGUNAN	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
3.2 REALISASI ANGGARAN	23
BAB IV. P E N U T U P.....	33
PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
TABEL.I.1.	KEADAAN PEGAWAI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 BERDASARKAN JABATAN	6
TABEL.I.2.	KEADAAN PEGAWAI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 BERDASARKAN GOLONGAN,	6
TABEL.I.3.	KEADAAN PEGAWAI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	6
TABEL.II.1	INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2019 - 2024.....	16
TABEL.III.1.	TARGET DAN REALISASI PADA INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN	22
TABEL.III.2	PERBANDINGAN REALISASI PADA INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2024-2024.....	23
TABEL.III.3.	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATORKINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2024.....	24
TABEL.III.4.	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024.....	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government), yaitu berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akip merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena

itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengelolaan sumberdaya Perikanan Kabupaten Luwu mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program, dengan memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan daerah. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Tahun 2019 - 2024 di implementasikan dalam program prioritas sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja dan kebijakan dinas, maka perlu disusun Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sebagai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan legalitas dalam rangka penyusunan dokumen rancangan rencana kerja ini adalah :

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 244 tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 7)
6. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas perikanan Kabupaten Luwu;
7. Peraturan Bupati Luwu No 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan setiap tahun merupakan perwujudan dari implementasi sistem pengendalian terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan yang dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian yang selaras. Maka atas dasar ini siklus Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diawali dengan Penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024, dan setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilakukan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Luwu tersebut. Selanjutnya sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana perolehan keberhasilan atas capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu serta pada akhir periode capaian kinerja yang berhasil diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan dilaporkan kepada Bupati Luwu sebagai pemberi amanah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu adalah :

1. Untuk menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja Kepala Dinas Perikanan kepada Bupati Luwu dan pihak yang berkepentingan;
2. Untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang, dan
3. Untuk dijadikan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

a. Tugas Pokok

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Dinas;
2. Penyusunan rencana strategik Dinas;
3. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural dan fungsional, serta staf dalam lingkup Dinas;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program/kegiatan Dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perikanan
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

1.5. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Bupati Luwu No. 141 Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum.
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Luwu didukung Oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang bertugas pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2024 sejumlah 57 orang yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 30 orang dan perempuan sebanyak 27 orang, sebanyak 37 ASN dan 20 Orang Non ASN.

Daftar nominatif pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dapat dilihat dari

Tabel I.1

TABEL I.1 Keadaan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2024 berdasarkan jabatan

No	Eselon	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk+Pr
1	Eselon I	-	-	-	-
2	Eselon II	1	-	1	1,89
3	Eselon III	1	2	3	5,66
4	Eselon IV	2	2	4	7,55
5	Pejabat Fungsional	6	3	9	16,98
6	JFT	-	2	2	3,77
7	Staf ASN	12	6	18	33,96
8	Staf Non ASN	7	9	16	30,19
	Jumlah	29	24	53	100

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024

TABEL I.2 Keadaan Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2024 berdasarkan Tingkat Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini

No	Golongan	Jumlah Pegawai			Persentase (%)
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk+Pr
1	IV	3	2	5	9,43
2	III	21	12	33	62,26
3	II	6	1	7	13,20
4	PTT	7	9	16	30,18
	Jumlah	29	24	53	100

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024

TABEL I.3 Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2024 berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SMA/Sederajat	9	-	9	20,45
D.III	-	1	1	2,27
S1	20	13	33	72,73
S2	2	1	3	4,55
Jumlah	31	15	46	100

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan sumberdaya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Luwu yang merupakan bukti pendukung yang pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini sehingga dapat menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja dinas perikanan Kabupaten Luwu yang telah dicanangkan pada tahun 2024 agar berhasil dicapai.

1.6 Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ataupun peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada SKPD
2. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Potensi sektor Perikanan menjadi salah satu modal dasar pembangunan Kabupaten Luwu. Hal ini dibuktikan dengan panjang garis pantai 139,92 Km. Dari total 22 wilayah kecamatan yang terdiri dari 227 Kelurahan dan Desa, dimana 11 Kecamatan diantaranya berada di wilayah pesisir dengan 45 Desa/Kelurahan. Mata pencaharian masyarakat terdiri dari nelayan sebanyak 4.434 orang, pembudidaya air payau 7.889 orang, dan pembudidaya air tawar 5.338 orang, pembudidaya laut 3.150 orang, pengolah hasil perikanan 1.200 orang, dan pemasar hasil perikanan 458 orang.

Kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan oleh masyarakat adalah budidaya air payau, budidaya laut dan budidaya air tawar. Total potensi lahan untuk kegiatan budidaya perikanan seluas 19.434,37 Km², terdiri dari lahan tambak seluas 11.535,48 Ha, lahan pemeliharaan ikan air tawar (mina padi dan kolam) 2.523,49 Ha, dan perairan pantai 15.000 Ha. Luas areal pertambakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sampai dengan tahun 2024 adalah 10.525,50 Ha yang tersebar pada 11 (sebelas) wilayah kecamatan. Komoditas yang dibudidayakan antara lain rumput laut *Gracillaria sp*, ikan bandeng dan udang windu. Budidaya ikan di air tawar untuk jenis ikan mas (*Ciprinus carpio*), ikan nila (*Oreochromis niloticus*) dan ikan lele (*Clarias gariepinus*) banyak dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan persawahan/kolam. Luas areal budidaya ikan di air tawar yang dikelola oleh masyarakat untuk lahan Kolam seluas 79,49 Ha dan lahan sawah seluas 2.444,00 Ha. Dalam rangka menggairahkan minat masyarakat untuk melaksanakan usaha budidaya ikan di air tawar, Pemerintah Kabupaten Luwu menyediakan 4 unit Balai Benih Ikan (BBI) yaitu BBI Bajo di Kelurahan Bajo, BBI Karetan di Baramamase, BBI Lamasi di Kelurahan Lamasi, dan BBI Rante Damai di Desa Rante Damai. Sedangkan kegiatan budidaya laut telah berkembang di Kecamatan Bua, Ponrang, Ponrang Selatan, Kamanre, Belopa Utara, Belopa, Suli, Larompong dan Larompong Selatan.

Komoditas utama yang dibudidayakan adalah rumput laut *Eucheuma cottonii*. Total luas pemanfaatan lahan tahun 2024 seluas 18.517,24 Ha. Kegiatan usaha penangkapan ikan pada tahun 2024 terdapat di 11 wilayah kecamatan pesisir, dengan

jumlah nelayan sebanyak 4.319 orang. jumlah perahu/kapal penangkap ikan pada tahun 2024 berjumlah 2.169 unit, perahu motor tempel 1.330 unit, dan kapal motor sebanyak 835 unit. Umumnya kapal motor berkapasitas 1 – 5 gross ton (GT). Jumlah alat tangkap sebanyak 2.169 unit. Peralatan yang banyak digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan adalah bagan apung, huhate, jaring insang, pancing, pukot cincin, rawai tetap, pancing ulur, dan sero. Adapun jumlah hasil produksi perikanan tangkap sebanyak 56 jenis ikan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan, maka pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Luwu diarahkan pada upaya pemeliharaan sumberdaya alam, pengembangan usaha budidaya laut, budidaya air tawar dan budidaya air payau, usaha penangkapan ikan serta pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana agribisnis dan agroindustri serta penguatan kelembagaan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu merupakan kerangka acuan (*guard line*) kebijakan, indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gambaran dan jawaban dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan itu sendiri. Rencana strategis ini merupakan alat bantu dalam mengukur efektivitas dari kinerja sumberdaya manusia pada instansi bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Nomor : 589/IX/Y/99, Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan masalah yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

2.1.1 Strategi

Dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, dan untuk mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan Perikanan Kabupaten Luwu, strategi pembangunan yang ditempuh dalam mencapai visi dan misi adalah:

1. Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir melalui penciptaan lapangan kerja baru/alternatif untuk memacu pertumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya lokal;
2. Pengembangan kawasan budidaya perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi budidaya perikanan;
3. Penerapan teknologi pada usaha perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Perikanan melalui pengembangan pola pembinaan berbasis kelompok bagi nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya;
5. Menjaga kelestarian sumberdaya Perikanan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem perairan serta memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya Perikanan;
6. Mengembangkan konsep partisipatif bersama seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan.

2.1.2. Kebijakan

Dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumberdaya Perikanan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka kebijakan pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Luwu, adalah:

1. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan lainnya;
2. Mengembangkan perikanan budidaya (komoditas unggulan) yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
3. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan;

4. Mengembangkan usaha penanganan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada di tingkat masyarakat;
5. Peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta penguatan kelembagaan;
6. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya Perikanan;
7. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya ikan beserta ekosistemnya;
8. Membangun koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Pembangunan Perikanan Kabupaten Luwu dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan hidup dan kemandirian nelayan dan pembudidaya.
2. Peningkatan jumlah produksi perikanan, produktifitas usaha dan mutu hasil – hasil perikanan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan lainnya;
3. Pengembangan potensi dan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi;
4. Peningkatan pembinaan dan pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya Perikanan;
5. Terwujudnya kelembagaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan lainnya;
6. Terwujudnya kondisi lingkungan sumberdaya Perikanan yang berkualitas dan terciptanya kelestarian daya dukung;
7. Peningkatan peran sektor Perikanan dalam perekonomian daerah dan nasional.

b. Sasaran

Sedangkan indikator-indikator sasaran pembangunan Perikanan Kabupaten Luwu yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 2,5% pertahun.
2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 1% pertahun.
3. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan sebesar 0,3% pertahun.
4. Meningkatnya pembinaan kelompok usaha perikanan sebesar 20 kelompok

pertahun.

5. Meningkatnya produksi perikanan kelompok nelayan.
6. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita sebesar 1% per tahun.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dalam menetapkan rencana kinerja tahunan

serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen RPJMD Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Indikator Kinerja Utama merupakan implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai selain itu Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Luwu dimana dalam pelaksanaannya dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Indikator Kinerja Utama yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu adalah disajikan pada **Tabel II.1**

**TABEL II.1. INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA
MENENGAH TAHUN 2019-2024**

NO	TUJUAN/SASARAN		REALISASI TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024	TAHUN 2025
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	3,73	2,50 - 4,50	2,50 - 4,50
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	(1,01)	3,00 - 4,99	3,00 - 4,99
2.	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pertumbuhan IKM Pengolahan Hasil Perikanan	n.a	1,00	1,00
		Persentase Pertumbuhan IKM Pemasaran Hasil Olahan Perikanan	n.a	1,00	1,00

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa dengan adanya Indikator Kinerja Utama maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dalam menetapkan rencana kinerja tahunan serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama adalah implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai selain itu Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Luwu dimana dalam pelaksanaanya dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari adanya target kinerja pada tahun 2019-2024 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai dengan cara melalui kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi perikanan yang digagas oleh pemerintah agar tercapainya realisasi.

2.4 Program Pembangunan

Sebagai tindak lanjut upaya mewujudkan visi dan misi, maka strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasi ke dalam program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Utama

1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan produktifitas usaha hasil produksi perikanan melalui kegiatan Promosi Produk Olahan Hasil Perikanan.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan meningkatkan produktifitas usaha budidaya perikanan melalui kegiatan pengembangan usaha budidaya air tawar dan air payau serta pengelolaan Kawasan perikanan budidaya.

3. Program Pemberdayaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan produktifitas usaha nelayan melalui kegiatan Pengembangan sarana penangkapan ikan, pembangunan/pengembangan tempat pendaratan ikan (TPI) serta pengelolaan tempat pendaratan ikan.

b. Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini terdiri dari 11 Kegiatan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan melalui peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, meningkatkan kinerja aparat dalam pelaksanaan tugas- tugas dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan serta meningkatkan dukungan operasional kedinasan dengan menyediakan sarana dan prasarana kerja demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas teknis/operasional kedinasan.

Pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan- kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini.

**Tabel Program Utama dan Kegiatan
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024**

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		SKPD, - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian - Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha Pengolahan dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan merupakan pendorong atau pemicu terhadap terealisasinya sasaran seperti yang ditargetkan dalam laporan pengukuran kinerja ini diuraikan kinerja Program dan Kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024.

Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan lapangan usaha disektor perikanan Meningkatkan		Pertumbuhan pelaku usaha/pekerja disektor perikanan
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Penilaian sakis yang diperoleh dari inspektorat
	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Tingkat konsumsi ikan
Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan		Pertumbuhan PDRB sektor perikanan
	Meningkatnya produktivitas sektor perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
		Persentase peningkatan produksi perikanan Budidaya

TABEL III.1 Target dan realisasi pada indikator kinerja dinas perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	729.434,12	690.428
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	19.193,79	19,032,90
2.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	710.081,02	671.054,41
3.	Pertumbuhan IKM Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	159,31	340,69
4.	Persentase Pertumbuhan IKM Pemasaran Hasil Olahan Perikanan	%	1	1

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi dimana Produksi Perikanan sebesar 94,65 %. Data tersebut merupakan laporan produksi dari Dinas Perikanan yang meliputi produksi perikanan tangkap, budidaya serta hasil olahan ikan dengan target capaian tahun 2024 untuk jumlah produksi perikanan budidaya sebanyak 710.081,02 ton, jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 19.193,79 ton sedangkan target untuk hasil olahan perikanan yaitu 159,31 Ton. Adapun realisasi pada tahun 2024 jumlah produksi perikanan mencapai 667.029,28 ton diantaranya pada produksi hasil budidaya sebanyak 671.054,41 ton dan produksi perikanan tangkap sebanyak 19,032,90 ton sedangkan realisasi produksi hasil olahan perikanan sebanyak 340,69 Ton .

Pembandingan yang dilakukan antara realisasi dengan target menunjukkan bahwa semua target belum sepenuhnya terealisasi. Dimana pada produksi perikanan budidaya dan juga tangkap masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, sehingga untuk mencapai target produksi berikutnya, dapat melalui kerjasama yang baik dari semua pihak (stakeholder) yang terkait sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bidang kelautan dan perikanan berjalan dengan baik memberikan hasil dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun produktivitas perikanan secara umum. Hasil yang dicapai pada Tahun 2024 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2 Perbandingan realisasi pada Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 dan 2024 Dinas Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	665.421,08	690.087,31
	Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.970,50	19,032,90
	Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	646.450,58	671.054,41

Dari tabel di atas terlihat Realisasi secara umum antara tahun 2023 dengan 2024 menunjukkan jumlah hasil produksi perikanan yang meningkat. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 realisasinya mengalami peningkatan yaitu sebanyak 671.054,41 Ton. Sedangkan untuk hasil perikanan tangkap juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 19,032,90 Ton. Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu pada Tahun 2024 telah menetapkan program sebagai pendukung indikator sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu berjalan dengan baik, keberhasilan capaian sasaran saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas capaian kinerja Dinas Perikanan pada tahun yang akan datang.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian misi strategis yang telah ditargetkan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Luwu. Sebagai bahan Akuntabilitas Keuangan

dibawah ini disajikan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan sasaran strategis guna mencapai tujuan, sasaran dan program sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024. Sebagaimana yang telah dikemukakan tentang rencana Kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2024 telah menetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan Tujuan yang tercakup dalam Program pada beberapa kegiatan dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.864.630.029,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) hingga berakhirnya tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp.13.009.022.409 (Tiga Belas Milyar Sembilan Juta Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah).

TABEL III.3.

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target kinerja Tahun 2024	Realisasi kinerja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	25,00	25,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	-	0,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target kinerja Tahun 2024	Realisasi kinerja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja (%)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	-	0,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	-	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100,00	100,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OB	504	432	85,71
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	714	-	0,00
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	-	0,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100,00	100,00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	1	50,00
		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100,00	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	11	-	0,00
		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Bulan	12	-	0,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	-	0,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	1	-	0,00
		Penyediaan Bahan Material	Bulan	12	-	0,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OK	500	125	25,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target kinerja Tahun 2024	Realisasi kinerja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja (%)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100,00	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	1	-	0,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	1	-	0,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100,00	100,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	2	33,33
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	unit	20	-	0,00
Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Ton	18.634,75	0,00	0,00
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	50,00	50,00
		Peyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket	2	-	0,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket	66	-	0,00
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	TPI	4	3	75,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target kinerja Tahun 2024	Realisasi kinerja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja (%)
		Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	TPI	4	3	75,00
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Ton	684745,43	0,00	0,00
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persen	100,00	50,00	50,00
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	5	-	0,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Unit/Paket	55	3	5,45
Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pertumbuhan IKM Pengolahan Hasil Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Ton	156,19	0,00	0,00
		Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi	4	0,00	0,00
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Komsumsi dan usaha Pengolahan dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota		1	-	-
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	4	-	0,00

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024.

TABEL III.4.
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran 2024	Tingkat Capaian Kinerja (%)
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
33.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	4.454.681.809	4.025.896.626,00	90,37
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.463.967	25.408.300,00	27,78
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	43.223.150,00	20.288.300	46,94
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	10.484.452,00	-	0,00
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.480.000,00	5.120.000	68,45
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	9.639.669,00	-	0,00
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	8.692.544,00	-	0,00
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5.963.892,00	-	0,00
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.980.260,00	-	0,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	3.826.234.606,00	3.532.116.743	92,31
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	3.610.975.521,00	3.392.436.743	93,95

Kode	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran 2024	Tingkat Capaian Kinerja (%)
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun	209.520.000,00	139.680.000	66,67
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.739.085,00		0,00
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	8.400.000,00	5.600.000	66,67
3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8.400.000,00	5.600.000	66,67
3.25.01.2.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	331.901.236,00	278.401.128	83,88
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4.430.000,00	4.385.800	99,00
3.25.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dalam 1 (satu) Tahun	4.976.500,00	4.912.300	98,71
3.25.01..2..06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandanya yang disediakan	6.969.000,00	2.855.000	40,97
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6.450.000,00	3.600.000	55,81
3.25.01..2.06.07	Penyediaan Bahan Material	jumlah bulan penyediaan bahan material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	62.729.736,00	55.944.265	89,18
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan atau diikuti	246.346.000,00	206.703.763	83,91
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	159.814.000,00	151.699.455	94,92
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi,air,dan listrik perkantoran	27.814.000,00	19.699.455	70,83
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Jasa Administrasi perkantoran	132.000.000,00	132.000.000	100,00

Kode	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran 2024	Tingkat Capaian Kinerja (%)
	Kantor				
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	36.868.000,00	32.671.000	88,62
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan (unit)	31.238.000,00	27.791.000	88,97
3.25.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5.630.000,00	4.880.000	86,68
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.139.474.220,00	1.861.864.716,00	87,02
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Sarana Prasarana dan pengelolaan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.	2.115.474.220,00	1.837.864.716,00	86,88
3.25.03.2.01 .02	Peyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang terjamin sarana usaha perikanan tangkap	33.500.000,00	33.500.000	100,00
3.25.03.2.01 .03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang terjamin sarana usaha perikanan tangkap	2.081.974.220,00	1.804.364.716	86,67
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
3.25.03.2.03 .02	Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	24.000.000,00	24.000.000	100,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Total Produksi Perikanan Budidaya	6.331.836.400,00	6.208.303.017,00	98,05

Kode	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran 2024	Tingkat Capaian Kinerja (%)
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar	6.331.836.400,00	6.208.303.017	98,05
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.087.922.400,00	2.044.071.100	97,90
3. 25. 04. 2. 04. 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.243.914.000,00	4.164.231.917	98,12
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Inovasi Teknologi produk olahan hasil Kelautan Perikanan Komsumsi dan Non Komsumsi	938.637.600,00	912.958.050,00	97,26
3.25.06.2.02	Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	938.637.600,00	912.958.050	97,26
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Komsumsi dan usaha Pengolahan dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Ikan Untuk Komsumsi dan Usaha Pengelahan dalam 1 (Satu) Daerah	20.600.100,00	-	0,00
3.25.06.2.02.01	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	918.037.500,00	912.958.050	99,45
			13.864.630.029,00	13.009.022.409,00	93,83

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Akuntabilitas kinerja juga dibarengi dengan akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu pada Tahun 2024 dengan total Anggaran sebesar Rp. 13.864.630.029,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Dari jumlah anggaran tersebut yang terealisasi sebesar sebesar Rp.13.009.022.409 (Tiga Belas Milyar Sembilan Juta Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). atau sebesar 93,83%.

3.3 Belanja Operasi dan Belanja Modal

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Tahun anggaran 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu mengalokasikan belanja Operasi sebesar Rp. 11.751.707.629 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.939.951.309 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah)

Sedangkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tahun Anggaran 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Mengalokasikan belanja Modal sebesar Rp. 2.112.922.400 (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 2.069.071.100 (Dua Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).

BAB IV**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dalam pencapaian misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Dinas Perikanan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan pembangunan tahun 2019. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Dinas Perikanan untuk mewujudkan Visi, dan misi yang telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang tercermin dari indikator sasaran Pembangunan Perikanan yang dilaksanakan dalam 4 (Empat) program.

Indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 tersebut merupakan parameter untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam menyelenggaraan pemerintahan yang merupakan komitmen instansi pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Alokasi anggaran belanja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu yang tersedia melalui APBD Kabupaten Luwu tahun 2024 untuk pelaksanaan Kinerja tersebut adalah sebesar 13.864.630.029,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah). Dikaitkan dengan pencapaian sasaran kinerja yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan menyerap anggaran yakni Rp.13.009.022.409 (Tiga Belas Milyar Sembilan Juta Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). atau sebesar 93,83%, Penyerapan anggaran ditahun 2024 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 93,48%. Untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Luwu serta Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu ditahun mendatang, maka perlu dilakukan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain :

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam penetapan rencana kegiatan yang diikuti pengendalian agar hasil pelaksanaan kegiatan lebih berhasil guna dan berdaya guna;
2. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai penggerak dan pelaku pelaksanaan pembangunan diikuti dengan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Lebih meningkatkan efisiensi, ekonomis, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu;
4. Agar Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dapat memberikan informasi yang memadai perlu dilakukan berbagai perbaikan terhadap pengumpulan data dan informasi yang diperlukan khususnya terkait dengan sistem pengumpulan data kinerja dan penetapan indikator kinerja sasaran.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu kepada Bupati Luwu selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dimasa datang.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. BAHARUDDIN**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd**
Jabatan : Bupati Luwu
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Belopa, 21 Februari 2024

Pihak Pertama,

DR. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd

Ir. BAHARUDDIN
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19650903 199203 1 011

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024 DINAS PERIKANAN LUWU**

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	2,50-4,50
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	3,00-4,99
2.	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pertumbuhan IKM Pengolahan Hasil Perikanan	%	1,00
		Persentase Pertumbuhan IKM Pemasaran Hasil Olahan Perikanan	%	1,00

Jumlah Anggaran :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp.	4.454.681.809
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	2.139.474.220
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	6.331.836.400
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	938.637.600
Jumlah	Rp.	13.864.630.029

Belopa, 21 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DR.Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd**Ir. BAHARUDDIN**

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19650903 199203 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2024 DINAS PERIKANAN

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI
1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	3,8
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	0,3
2	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pertumbuhan IKM Pengolahan Hasil Perikanan	%	3,8
		Persentase Pertumbuhan IKM Pemasaran Hasil Olahan Perikanan	%	34

Jumlah Anggaran :

	<u>Program</u>	<u>Pagu</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 4.454.681.809	Rp. 4.025.896.626	90,37
-	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.139.474.220	Rp. 1.861.864.716	87,02
-	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 6.331.836.400	Rp. 6.208.303.017	98,05
-	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan dan pembudidayaan Ikan	Rp. 938.637.600	Rp. 912.958.050	97,26

Belopa, 21 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DR. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd

Ir. BAHARUDDIN

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19650903 199203 1 011